

PEMANFAATAN ICT DALAM PENINGKATAN GOOD GOVERNANCE**Emilkamayana¹, Nadiroh², Aminah Zuhriyah³, Alprida Harahap⁴, M. Tohirin Hasan⁵**¹Universitas Negeri Jakarta²Universitas Negeri Jakarta³Universitas Negeri Jakarta⁴Universitas Negeri Jakarta⁵Universitas Negeri Jakarta*E-mail:* emilkamayana@gmail.com**ABSTRAK**

Perkembangan ICT dari tahun ke tahunnya mengalami perubahan yang sangat positif. Hal ini terlihat dengan adanya inovasi teknologi yang membantu peningkatan pelayanan dari public service Pemerintahan yang semakin mudah diakses secara online dimana pun dan kapan pun. Keterbatasan ruang dan waktu tidak menjadi sebuah hambatan dalam mengakses informasi secara terbuka dan cepat. Berbagai keunggulan dari ICT ini telah mewujudkan terciptanya Good Governance bagi pihak Pemerintah itu sendiri. Pada artikel ini memakai metode kualitatif dengan teknik mensintesis sepuluh artikel yang terkait dengan ICT dan Good Governance. Tren baru dalam penggunaan ICT yang semakin luas dengan penggunaan media sosial dan aplikasi telepon pintar, makin meningkat kemungkinan untuk pertukaran data, yang sangat didukung oleh partisipasi dan kolaborasi dari semua aspek stakeholder terkait dalam berinteraksi dengan Pemerintahan. Semakin banyak kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan platform online untuk partisipasi dan kolaborasi dalam praktik perencanaan dan proses pengambilan keputusan secara transparan dan adil. Pemanfaatan ICT akan menciptakan konsep transparansi dalam penyampaian informasi yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder terkait. Oleh karenanya tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam mendapatkan informasi public secara kredibel. Sehingga, terbentuklah citra yang positif bagi pihak Pemerintah itu sendiri.

Kata kunci : *ICT, Good Governance, Pemanfaatan, Peningkatan*

LATAR BELAKANG

Perkembangan ICT dari tahun ke tahunnya mengalami perubahan yang sangat positif. Hal ini terlihat dengan adanya inovasi teknologi yang membantu peningkatan pelayanan dari public service Pemerintahan yang semakin mudah diakses secara online dimana pun dan kapan pun. Keterbatasan ruang dan waktu tidak menjadi sebuah hambatan dalam mengakses informasi secara terbuka dan cepat. Berbagai keunggulan dari ICT ini telah mewujudkan terciptanya *Good Governance* bagi pihak Pemerintah itu sendiri. Keterbukaan atas adanya informasi secara transparan dan

kredibel mendukung terciptanya citra positif bagi pihak Pemerintah.

Omri dan Mabrouk (2020) menemukan bahwa konsep *Good Governance* mencakup kapasitas untuk merencanakan dan membuat organisasi atau lembaga dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Prinsip tata kelola yang baik akan memastikan partisipasi setiap komponen terkait dalam melakukan pengambilan keputusan dengan penyeimbangan antara masing - masing komponen baik ekonomi, lingkungan, sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Dukungan ICT juga merupakan komponen yang tidak

dapat terpisahkan dalam pelaksanaan Good Governance tersebut.

Biwas, et. al., (2019) menemukan bahwa pentingnya untuk memahami komponen-komponen tata kelola yang baik (Good Governance), karena hal itu juga memberi label pada seperangkat atribut inisiatif kelembagaan yang akan mendorong peningkatan otoritatif, manajemen adaptif dan kepemimpinan yang kuat. Semua hal tersebut akan membentuk pergeseran kearah peningkatan kapasitas dari Pemerintahan. Seperti pada pemahaman awal tentang makna dari Pemerintahan adalah pelaksanaan kekuatan politik dalam mengelola urusan suatu negara. Seiring perubahan zaman definisi Pemerintahan tersebut berubah menjadi bentuk kemampuan otoritas Pemerintahan dalam membuat aturan untuk memberikan layanan publik dalam mewujudkan kualitas kehidupan warganya secara lebih baik. Oleh karenanya sangat penting sekali dalam penerapan pengelolaan Good Government yang sesuai dalam peningkatan kualitas hidup dari masyarakat. Hal ini dikarenakan baik atau buruknya hasil tata kelola Pemerintahan yang dilakukan akan mempengaruhi kemampuan otoritas dari Pemerintahan kepada masyarakat itu sendiri.

Dijkstra (2017) menemukan bahwa pentingnya keseimbangan aspek politik, administratif, dan yudisial dari tata pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan dengan keselarasan aspek tersebut akan membentuk tata kelola negara secara lebih baik. Ditambah lagi dengan pemanfaatan teknologi yang terbaru akan mendukung terciptanya tata kelola tersebut. Oleh karenanya penggunaan ICT ini menjadi sebuah prioritas yang harus diperhatikan pelaksanaannya dengan tepat sasaran. Atas dasar itulah sehingga penulis mengangkat judul tentang pemanfaatan ICT dalam peningkatan Good Governance.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik tinjauan pustaka dengan meninjau dan mensintesis artikel yang berkaitan dengan ICT dan Good Governance. Proses metode ini digunakan karena penulis ingin fokus terhadap kajian literature yang diambil. Tahapan dimulai dengan pertama, mencari artikel relevan sesuai tema, kedua melakukan filterisasi artikel yang dipilih, ketiga melakukan analisis hasil artikel yang didapatkan sebanyak sepuluh artikel, keempat melakukan penarikan kesimpulan pada seluruh artikel yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mollick, et. al., (2018) menyatakan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung terciptanya Good Governance secara berkelanjutan. Hal ini juga didukung penuh oleh penggunaan teknologi dalam mendistribusikan informasi secara tepat sasaran. Tata kelola yang baik sendiri merupakan suatu pola tindakan dalam membangun, mempromosikan dan mendukung hubungan antara actor Pemerintah dan non-Pemerintah dalam proses Pemerintahan tersebut. Oleh karena prinsip Good Governance menjadi sebuah keharusan dalam menciptakan kondisi negara yang layak bagi masyarakatnya.

Lin (2018) menemukan bahwa terdapat perbedaan antara konsep dan praktik tata kelola Pemerintahan yang menggunakan teknologi dengan yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Perbandingan yang terjadi membuat perbedaan implementasi dalam praktik tata kelola Pemerintahan. Temuan ini menurut Lin (2018) yakni Tata pemerintahan yang cerdas terkait erat dengan tata kelola elektronik yang terbaru jika dibandingkan dengan kebalikannya. Oleh karenanya penggunaan media sosial, telepon pintar, portal, *platform*, dan sistem pendukung

perencanaan computer yang pada umumnya mempromosikan pemerintah dan layanan yang cerdas, partisipasi elektronik, dan kolaborasi yang lebih luas melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Hal tersebut semakin menyebabkan perubahan bertahap dalam organisasi pemerintah, dan membentuk hubungan baru antara pemerintah, sektor swasta dan warga negara, serta perbaikan dalam pengelolaan Pemerintahan secara lebih baik.

Misuraca, et. al., (2012) menemukan bahwa serangkaian skenario visioner tentang bagaimana masyarakat Eropa dapat berkembang pada tahun 2030 dengan menggunakan alat TIK canggih dan teknik pemodelan dan mengintegrasikannya ke dalam proses tata kelola dan mekanisme pembuatan kebijakan menjadi sebuah keunggulan kompetitif bagi negaranya. Hal ini dikarenakan penggunaan TIK tersebut semakin memudahkan masyarakat Eropa tersebut dalam mendapatkan informasi secara tepat dan cepat.

Adam (2020) menemukan bahwa peningkatan pengembangan dalam inisiatif *e-government* di negara Afrika telah menurunkan tingkat korupsi di negara tersebut. Hal ini dikarenakan pemantauan yang sangat rutin dan cepat dalam penanganan tindak korupsi tersebut. Hasil temuan tersebut didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengembangan *e-government* dan kualitas kelembagaan serta penanganan tingkat korupsi.

Termeer and Bruinsma (2016) menyatakan bahwa pentingnya kolaboratif TIK dalam pengelolaan Pemerintahan secara lebih baik dapat membantu untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam batasan fisik, kognitif dan sosial. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan yang terjadi dalam proses Pemerintahan sangat didukung oleh semua aspek baik aktifitas secara *offline* maupun online. Oleh karena peran

kolaboratif dari TIK menjadi aspek utama peningkatan Good Governance tersebut.

Bannister and Connolly (2014) menemukan bahwa Pemerintah transformatif dan nilai-nilai public merupakan komponen utama dalam mendukung terciptanya Good Governance. Hal ini dikarenakan public merupakan penilai utama dalam segala macam implementasi yang dilakukan oleh Pemerintahan tersebut. Apabila informasi yang disebarakan tidak dapat menjangkau seluruh aspek terkait maka akan menjadi sebuah kerugian bagi negara. Oleh karenanya dengan adanya ICT ini mengubah tatanan Pemerintahan menjadi lebih terbuka, transparan, partisipatif dan responsive.

Reyes and Garcia (2014) menyatakan bahwa pentingnya potensi teknologi informasi untuk mempromosikan transformasi pemerintah. Transformasi ini telah dipahami setidaknya dalam dua cara yang berbeda: (1) sebagai transformasi proses internal dan (2) sebagai transformasi hubungan antara pemerintah dan aktor sosial dan politik lainnya (transformasi kelembagaan). Oleh karenanya Teknologi informasi memiliki potensi positif secara signifikan mengubah cara pemerintah dalam menjalankan fungsi mereka dan berhubungan dengan warganya, serta aktifitas Pemerintahan lainnya.

Guha and Chakrabarti (2014) menemukan bahwa pentingnya penerapan dari *e-government* harus dipandang sebagai jaringan yang luas. Penerapan konsep jaringan seperti sebagai contoh pada aspek politik pemilihan mitra, pencapaian tujuan jaringan, proses pelembagaan, penataan jaringan dan desain insentif dapat membuat proyek *e-government* menjadi lebih realistis. Hal ini dikarenakan jika informasi yang disampaikan oleh *e-government* ini tidak sesuai dengan tujuan dari jaringan tersebut akan menyebabkan kegagalan *e-government* yang berdampak pada kerugian negara.

Navarro, et. al., (2014) menyatakan bahwa pengetahuan tentang ICT berpotensi dalam meningkatkan keterlibatan dengan membantu pengguna membuat keputusan pribadinya dalam rentang domain yang semakin meningkat. Hal tersebut berdampak positif dalam pembentukan pengelolaan Pemerintahan yang baik. Pengetahuan yang diperoleh mendukung segala visi dan misi tersebut.

Lee, et. al., (2019) menemukan bahwa praktik berbasis teknologi informasi (TIK) tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali jika warga negara mengakui dan bertindak atas tanggung jawab secara aktif terlibat dengan platform media sosial pemerintah. Oleh karenanya sangat penting partisipasi dari masyarakat dengan penggunaan TIK tersebut. Pemerintah sendiri mengelola komunikasi media sosial secara responsive agar penyampaian informasi terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kepercayaan awal pada pemerintah adalah penentu penting dari persepsi sumber daya digitalnya. Warga negara yang mempercayai pemerintah cenderung mengevaluasi inisiatif baru secara positif dan lebih mungkin menerima dan memanfaatkannya.

Tren baru dalam penggunaan ICT yang semakin luas dengan penggunaan media sosial dan aplikasi telepon pintar, makin meningkat kemungkinan untuk pertukaran data, yang sangat didukung oleh partisipasi dan kolaborasi dari semua aspek *stakeholder* terkait dalam berinteraksi dengan Pemerintahan. Semakin banyak kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan platform online untuk partisipasi dan kolaborasi dalam praktik perencanaan dan proses pengambilan keputusan secara transparan dan adil.

Kemudian juga terciptanya peningkatan partisipasi kelompok (khususnya remaja muda) yang semakin luas dan tertarik dalam konteks tersebut.

Walaupun tetap tidak mengecualikan komponen orang dewasa (orang tua) yang biasanya tidak terbiasa dengan perkembangan teknologi baru. Namun dengan adanya pemanfaatan ICT ini membuat batasan tersebut dapat dihilangkan dan semua informasi dapat diterima semua kalangan tersebut.

KESIMPULAN

Teknologi baru memberikan cara baru dalam berinteraksi dan melakukan kolaborasi dengan warga, pemerintah, bisnis, dan berbagai lembaga dalam menambah pemahaman mereka tentang kondisi Pemerintahan saat ini. Kemudian juga karakteristik utama yang menjadi ciri khas dari tata kelola yang cerdas (Good Governance) adalah kolaborasi yang diproduksi bersama, di mana pemerintah dan semua aktor terkait terutama masyarakat dapat meneliti kekuasaan dan otoritas dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Tata kelola yang cerdas ini dapat membantu membangun hubungan yang seimbang antara negara, dan masyarakat sipil.

Kemudian juga keunggulan dalam pemanfaatan ICT bagi Pemerintah khususnya merupakan sebuah nilai positif yang harus dikembangkan secara strategis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan Good Governance. Hal ini dikarenakan dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut akan menciptakan konsep transparansi dalam penyampaian informasi yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder terkait. Oleh karenanya tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam mendapatkan informasi public secara kredibel. Sehingga, terbentuklah citra yang positif bagi pihak Pemerintah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Ibrahim. (2020). Examining E-Government Development Effects

- on Corruption in Africa: The Mediating Effects of ICT Development and Institutional Quality. *Technology in Society*, 61, 1-10.
- Bannister, Frank and Regina Connolly. (2014). ICT, Public Values and Transformative Government: A Framework and Programme for Research. *Government Information Quarterly*, 31, 119-128.
- Biwas, Rathin, Arnab Jana, Kavi Arya, and Krithi Ramamritham. (2019). A Good Governance Framework for Urban Management. *Journal of Urban Management*, 8, 225-236.
- Dijkstra, Geske. (2017). Aid and Good Governance: Examining Aggregate Unintended Effects of Aid. *Evaluation and Program Planning*, 1-28.
- Guha, Joydeep, and Bhaskar Chakrabarti. (2014). Making e-government Work: Adopting the Network Approach. *Government Information Quarterly*, 1-10.
- Lee, Taejun (David), Hyojung Park, and Junesoo Lee. (2019). Collaborative Accountability for Sustainable Public Health: A Korean Perspective on The Effective Use of ICT Based Health Risk Communication. *Government Information Quarterly*, 226-236.
- Lin, Yanliu. (2018). A Comparison of Selected Western and Chinese Smart Governance: The Application of ICT in Governmental Management, Participation and Collaboration. *Telecommunications Policy*, 1-10.
- Misuraca, Gianluca, David Broster, and Clara Centeno. (2012). Digital Europe 2030: Designing Scenarios for ICT in figure Governance and Policy Making. *Government Information Quarterly*, 29, 121-131.
- Mollick, Abdus Subhan, Khalilur Rahman, Nabiul Islam Khan, and Nazmus Sadath. (2018). Evaluation of Good Governance in a Participatory Forestry Program: a Case Study in Madhupur Sal Forests of Bangladesh. *Forest Policy and Economics*, 95, 123-137.
- Navarro, Juan Gabriel Cegarra, Alexeis Garcia Perez, and Jose Luis Moreno Cegarra. (2014). Technology Knowledge and Governance: Empowering Citizen Engagement and Participation. *Government Information Quarterly*, 1-9.
- Omri, Anis, and Nejah Ben Mabrouk. (2020). Good Governance for Sustainable Development Goals: Getting ahead of the Pack or Falling Behind?. *Environmental Impact Assessment Review*, 83, 1-8.
- Reyes, Luis F., and J. Ramon Gil Garcia. (2014). Digital Government Transformation and Internet Portals: The Co-Evolution of Technology, Organizations, and Institutions. *Government Information Quarterly*, 1-11.
- Termeer, Catrien Jam, and Anne Bruinsma. (2016). ICT Enabled Boundary Spanning Arrangements in Collaborative Sustainability Governance. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 18, 91-98.